SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Shofwanul Mu’minin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mshofwanul@gmail.com

Abstrak

Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan. Permasalahan pada penelitian ini adalah pada penyebab terjadinya konflik pada keluarga, dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dekomendasi. Berdasarkan hasil analisa, penelitian ini dapat di simpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.

Kata Kunci: Konflik Keluarga; Pembagian Harta Waris; Hibah

Pendahuluan

Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain.¹ Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu barang, uang, jasa dll yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdangan, walaupun di mugkinkan masih mengharapkan timbal balik di sebut hadiah.

Waris merupakan salah satu ajaran agama yang sudah di anjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketaatan umat islam

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).435

bepedoman kepada ajaran yang telah ditetapkan dalam agama Islam itu sendiri. Waris sendiri berarti harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, *Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan*. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, maka harus atas musyawarah bersama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.²

Namun secara normatif, pembagian harta warisan dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia. Seperti halnya yang dijelaskan didalam buku terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10 karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili *bahwasannya salah satu rukun dan syarat terjadinya pewarisan adalah orang yang mewarisi (muwarras) merupakan orang mati yang meninggalkan harta atau hak*.³

Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan yang ditinggalkan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara lain dengan sistem hibah, yaitu membagi hartanya ketika pewaris belum meninggal.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengetaan tanah dalam pembagian warisan. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antar masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam keluarga. Beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik dalam perebutan harta warisan dalam keluarga adalah pembagian yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama.

Dalam pembagian waris tidak akan lepas dari yang namanya konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi seringkali karena dalam pembagiannya tidak mementingkan musyawarah bersama. Walaupun dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, yang mana harta diberikan ketika orang tua masih hidup akan tetapi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu maka yang akan terjadi ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia adalah perebutan harta warisan. Hal seperti inilah yang sering kali mengakibatkan perpecahan dalam keluarga.

Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).473

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010).346

warisan. Tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan.

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga bapak Wakiman dengan keluarga ibu Kasemi, yang mana mereka berdua adalah saudara kandung dari alm. ibu Wakimah. Semasa hidup ibu Wakimah masih mempunyai ladang untuk menopang hidupnya. Karena ketika anak-anaknya menikah sudah dibagikan warisan masing-masing. Sebelum meninggal sempat memberikan tanah ladang yang dikelolanya kepada anak ibu Kasemi dan tanpa sepengetahuan dari anak yang lainnya. Ketika ibu Wakimah meninggal, anak-anaknya ingin membagi tanah yang di tinggalkan ibu Wakimah. Dalam hal ini anak laki-laki yaitu bapak Wakiman meminta tanah yang dibuat lahan pertanian dan ibu kasemi dikasih satu petak tanah yang berada disamping rumah orang tuanya. Dalam perebutan tanah ini tidak menemukan titik terang yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antar keluarga sampai pada saat ini.

Untuk mengetahui keaslian pada penelitian ini maka akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema pada artikel ini. penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Rita Fitria, pada tahun 2019. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak di Laksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)”.⁴ Pembahasan terkait penyelesaian sengketa pembagian harta waris ini dikarenakan tidak terlaksananya wasiat oleh ahli waris yang lainnya. Pada permasalahan ini dibahas sesuai undang-undang yang berlaku yaitu sesuai hukum perdata dan hukum Islam.

Kemudian pada penelitian selanjutnya adalah penelitian jurnal oleh Dedi Agus Riadi dan Bartoven Vivit Nurdin pada tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Marga Pugung Tampak: Studi Konflik Keluarga dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung”.⁵ Pada penelitian ini pokok pembahasannya mengenai konflik yang terjadi dikeluarga dikarenakan sistem pewarisan di marga pugung tampak masih menggunakan sistem mayorat, yang mana anak laki-laki pertama akan mendapat bagian lebih banyak dari yang lainnya.

Selanjutnya adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wiwin Supriyani, pada tahun 2016. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)”.⁶ Dalam skripsi ini yang dibahas adalah penyelesaian sengketa akibat dari

⁴ Rita Fitria, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak di Laksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)” (Undergrate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

⁵ Dedi Agus Riadi dan Bartoven Vivit Nurdin, “Marga Pugung Tampak: Studi Konflik keluarga dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung”, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 2, (2016).

⁶ Wiwin Supriyani, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)” (Undergrate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

pembagian warisan antar ahli waris, yang kemudian dalam pembahasannya di tekankan pada hukum perdatanya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.⁷ Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁸ Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang di ajukan pada penelitian ini dapat diperoleh dari jawaban para informan atau narasumber secara langsung, yang mana di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan tersebut masih ada konflik sesama keluarga dikarenakan pembagian harta warisan. Kemudian dalam metode pengumpulan data, artikel ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Pembahasan

Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah

Konflik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga yang dianggap penting untuk merangsang pemikiran-pemikiran baru dan menguatkan solidaritas jika konflik itu bisa diambil dari sisi positifnya. Namun jika konflik yang diambil dari sisi negatif, maka yang ada hanyalah perpecahan secara bersama. Menurut Erikson, konflik terjadi dalam tiga level yaitu: (1) konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik terjadi ketika didalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; dan (3) konflik yang terjadi ketika dalam menentukan cara beradaptasi.⁹

Seringkali dalam pembagian harta waris terjadi konflik antar anggota keluarga. Tak jarang pula ketika terjadi konflik para anggota keluarga sampai memutus hubungan keluarga, bahkan tak jarang ada yang sampai berani saling membunuh. Pada dasarnya pembagian harta waris di lakukan ketika orang tua atau apewaris sudah meninggal dunia Namun di sebagian wilayah ketika membagi harta warisan dengan sistem hibah, yaitu di berikan orang tua masih hidup dan di

⁷ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).52.

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).105.

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).99.

berikannya ketika anak sudah menikah atau sudah tidak dalam pengampuan orang tua. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Dalam pembagiannya di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ini masih sesuai dengan ajaran Islam, yang mana dalam pembagiannya anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, hanya saja hal seperti ini hanya bagi orang tuanya yang mampu. Kalau orang tuanya pas-pasan biasanya hartanya itu di bagi secara merata. Tak jarang pula terjadi perselisihan karena pembagian yang tidak merata dan disebabkan karena wasiat sepihak.

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga bapak Wakiman dengan keluarga ibu Kasemi, yang mana mereka berdua adalah saudara kandung dari alm. ibu Wakimah. Semasa hidup ibu Wakimah masih mempunyai ladang untuk menopang hidupnya. Karena ketika anak-anaknya menikah sudah dibagikan warisan masing-masing. Sebelum meninggal sempat memberikan tanah ladang yang dikelolanya kepada anak ibu Kasemi dan tanpa sepengetahuan dari anak yang lainnya. Ketika ibu Wakimah meninggal, anak-anaknya ingin membagi tanah yang di tinggalkan ibu Wakimah. Dalam hal ini anak laki-laki yaitu bapak Wakiman meminta tanah yang dibuat lahan pertanian dan ibu kasemi dikasih satu petak tanah yang berada disamping rumah orang tuanya. Dalam perebutan tanah ini tidak menemukan titik terang yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antar keluarga sampai pada saat ini.

Menurut bapak wakiman, pada saat dirinya masih kecil sudah ikut membantu orang tuanya agar mendapatkan tanah perkebunan. menurutnya pada saat orang tuanya masih sehat sampai sakit bapak wakiman yang ngerawat orang tuanya, pada saat sakit sebelum meninggal, orang tuanya di bawa ke rumah ibu kasemi setelah dua minggu kemudian meninggal dirumah ibu kasemi. Ketika orang tuanya sudah meninggal, bapak wakiman ini ingin meminta tanah kepunyaan almarhumah ibu wakimah karena punya hak dan pernah ikut merawat orang tuanya, namun pada saat tanahnya mau di ambil keluarga yang ibu kasemi marah-marah karena juga ikut merawat ibunya.

Kemudian menurut ibu kasemi selaku saudara kandung bapak wakiman juga berpendapat bahwa keributan terjadi karena awal mulanya barang-barang peninggalan orang tuanya sudah diambil saudaranya yaitu bapak wakiman semua. Beliau juga berkata kalau pada saat orang tuanya masih hidup tanah yang dulunya di tempati sebagai rumah orang tuanya dan tanah ladang yang di timur itu sudah di bukukan atas nama ibu Kasemi. Disamping itu juga ada satu petak ladang yang sangat lebar, ladang di pohon angka tersebut asalnya di bagi dua buat bapak Wakiman dan orang tuanya. Ladang tersebut oleh orang tuanya di suruh untuk mengelola bapak Wakiman untuk mengelolanya, ternyata tanah tersebut diambil semua oleh anak yang laki-laki, anak yang perumpaan dalam hal ini ibu Kasemi tidak mendapat bagian atas tanah tersebut. Dalam hal ini, ibu kasemi merasa dalam pembagiannya tidak adil, karena dirinya juga ikut merawat ibunya pada saat sakit, bahkan setiap hari yang selalu memberi makan sebelu ibunya dipindah kerumahnyanya dan ibunya juga meninggal dirumahnyanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi

pada keluarga adalah dalam pembagian harta waris tidak merata dan saling memperebutkan haknya karena ikut merawat orang tuanya pada saat sakit. Dalam hal ini karena biasanya anak yang di ikuti orang tuanya sampai meninggal, maka dia yang akan mendapat tambahan harta warisan. Kemudian konflik terjadi juga karena kurangnya pemahaman mengenai pembagian waris dan hibah dan wasiat sepihak.

Konflik yang sering terjadi adalah ketika harta atau tanah yang dipakai orang tua untuk kehidupannya tatkala masih hidup. Yang mana kebanyakan dari permasalahan tersebut juga karena wasiat secara sepihak seperti "*siapa pun yang merawat saya sampai meninggal, maka akan mendapat tanah yang saya buat pangan ini*". Hanya saja yang demikian ini biasanya diucapkan kepada salah satu calon ahli waris saja, sehingga calon ahli waris yang lain tidak mengetahui. Kemudian konflik juga terjadi karena ahli waris ini yang sudah mendapat pembagiannya masing-masing belum membalik nama sertifikat tanah, sehingga pada saat orang tua meninggal masih memperebutkan harta peninggalannya.

Dalam fikih sebenarnya juga sudah di jelaskan lewat beberapa pendapat jumbuh ulama mengenai pemberian hibah. Diantaranya adalah orang yang berhak menerima harta hibah adalah siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris sendiri maupun diluar calon ahli waris tanpa di batasai besaran nilai harta yang akan diberikannya.¹⁰ Kemudian dalam pendapat lain dari jumbuh ulama juga mengatakan bahwa jika orang tua yang memberikan hibah terhadap calon ahli warisnya ketika dalam keadaan sakit dan setelah itu meninggal dunia maka hibah tersebut termasuk dalam sepertiga warisannya.¹¹

Hal ini yang kurang difahami oleh sebagian masyarakat sehingga masih sering terjadi konflik antar keluarga. Begitupun juga pada saat terjadinya konflik, masyarakat masih enggan untuk bermusyawarah dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam meyelesaikan masalah. Mereka lebih memilih untuk bermusyawarah sendiri yang notabennya dalam keluarga tersebut belum memahami akan pembagian waris, sehingga hanya berdasarkan musyawarah sendiri akhirnya salah satu dari ahli waris tersebut mengalah walaupun hak-haknya di ambil oleh ahli waris yang lain. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kerenggangan keluarga sampai pada saat ini. Mereka masih enggan untuk bertegur sapa dan memilih untuk bermusuhan selamanya.

Dalam teori konflik klasik juga dijelaskan bahwa konflik itu dari sifat alami manusia, yang mana sifat manusia itu cenderung saling memusuhi dan saling bersifat kompleks dalam kekuasaan.¹² Dalam teori ini jika korelasikan dengan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya konflik pada keluarga akibat pembagian harta warisan ini adalah sifat alami pada manusia yang cenderung saling memusuhi jika tidak sesuai dengan apa yang di inginkannya.

Jika melihat dari cara pembagiannya, maka pembagian harta warisan di Dusun Betiring ini adalah dengan memberikannya ketika pewaris masih hidup,

¹⁰ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 75

¹¹ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 16.

¹² M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", *JURNAL AL-HIKMAH*, Vol.3 No.1 (2017), 34.

yang mana warisan dibagi saat orang tua masih ada dan di berikannya ketika anak sudah tidak dalam pengampuannya atau sudah menikah. Penyebab terjadinya konflik keluarga akibat pembagian harta kepada calon ahli waris dengan hibah ini karena masing-masing pihak merasa pembagian yang tidak merata. Pembagian yang tidak merata inilah yang akan menimbulkan permusuhan dalam keluarga. Disamping itu pula penyebab lainnya adalah saling mengeklaim bahwa dirinya telah ikut andil dalam merawat orang tuannya pada saat masih hidup. Oleh karena itu, ketika keluarga belum mengerti terkait berapa bagian yang harus di bagikan kepada calon ahli waris maka bisa musyawarah bersama tokoh agama setempat. Hanya saja kebanyakan dari masyarakat masih enggan untuk bermusyawarah bersama tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat.

Dalam asas bilateral yang mana seseorang menerima hak maupun bagian harta warisan baik dari keturunan laki-laki maupun keturunan pihak perempuan. Asas ini dapat di temui pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.¹³ Dalam hal ini, jika dalam keluarga tersebut menggunakan asas ini maka kecil kemungkinan akan terjadi perselisihan karena dalam asas ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya pada masyarakat Jawa masih banyak banyak yang menggunakan sistem patrilineal dalam membagi harta warisan. Seperti halnya yang terjadi di keluarga bapak Wakiman yang menganggap bahwa anak laki-laki harus mendapat harta yang paling banyak dari pada anak perempuan. Hal inilah yang sering menjadi faktor terjadinya konflik dikeluarga, yang mana mereka lebih mementingkan ego sendiri agar mendapat hak yang lebih banyak. Terlebih mereka juga enggan untuk bermusyawarah dengan tokoh masyarakat dengan dali malu takun ketahuan orang banyak. Sehingga walaupun di selesaikan sendiri maka yang ada hanya akan memendam rasa dendam, dalam hal ini akan mengakibatkan permusuhan selamanya.

Penyelesaian Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif KHI Pasal 211

Setiap konflik yang terjadi tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan konflik yang terjadi pada keluarga akibat pembagian waris. Penyelesaian konflik akibat pembagian harta waris biasanya dapat di tempudengan dua cara yaitu dengan musyawarah antar keluarga dan menyelesaikan lewat pengadilan. Namun pada kenyataannya masyarakat Dusun Betiring, Desa Sumberagung ketika terjadi konflik akibat pembagian harta waris tidak sampai ke pengadilan, bahkan tak jarang sampai ke pihak desa. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri agar orang lain tidak mengetahui permasalahannya.

Menurut bapak wakiman ketika ada konflik konflik yang terjadi akibat pembagian waris dengan saudaranya hanya sampai pada kekeluargaan, dan tidak sampai membawa ke perangkat desa.¹⁴

Kemudian menurut ibu kasemi dalam penyelesaian permasalahan dengan

¹³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 5

¹⁴ Wakiman, Wawancara, (lamongan, 22 November 2019)

saudaranya adalah lebih memilih mengalah dan memberikan tanah yang diminta oleh saudaranya itu agar permasalahannya dengan saudaranya tidak terdegar orang lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa ketika ada konflik yang terjadi di keluarganya, mereka lebih memilih diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke perangkat desa apalagi sampai ke meja pengadilan. Dalam masalah penyelesaian konflik keluarga atau sengketa yang terjadi di masyarakat akibat pembagian harta orang tua yang terkadang disebabkan karena tidak merata atau tidak adil dalam pembagiannya, sebenarnya bisa di tempuh dengan dua cara, yaitu dengan kekeluargaan atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Seperti halnya yang sudah di sudah dijelaskan dipembahasan pertama orang yang berhak menerima harta hibah adalah siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris sendiri maupun diluar calon ahli waris tanpa di batasai besaran nilai harta yang akan diberikannya.¹⁵ Dalam hal ini orang tua mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya yang akan di hibahkan kepada siapapun dan dalam jumlah berapapun. Sehingga nantinya ahli waris bisa saja mendapat harta dua kali, yaitu dari jalur hibah ketika pewaris masih hidup dan dari waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Dalam hal lain terdapat perbedaan pendapat menurut jumhur ulama yang mana jika orang tua yang memberikan hibah terhadap calon ahli warisnya ketika dalam keadaan sakit dan setelah itu meninggal dunia maka hibah tersebut termasuk dalam sepertiga warisannya.¹⁶ Hal ini maka ketika hibah diberikan pada saat orang tua dalam keadaan sakit dan meninggal dunia maka harta yang diberikan termasuk termasuk dalam harta warisan, yang mana harta tersebut nantinya di kumulasikan dari harta peninggalan yang lain.

Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Dalam pemberian hibah yang mana besaran jumlahnya telah di tentukan sebanyak-banyak 1/3 dari harta yang dimiliki, hal ini merupakan demi kemaslahatan bersama. Dengan di batasi jumlahnya ketika terjadi konflik maka bisa langsung megkalkulasikan menjadi harta warisan. Disamping itu pula pada pasal 210 ini juga menyebutkan bahwasannya ketika memberikan harta waris dengan hibah harus dihadapan dua orang saksi. Keberadaan para saksi sangat berpengaruh ketika terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Dalam hal ini jika nantinya terjadi konflik maka saksi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baik pada keluarga sendiri maupun di pengadilan. Disamping itu

¹⁵ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 75

¹⁶ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 16.

pula, pada pasal 210 juga menyebutkan bahwa orang yang dapat menghibahkan hartanya adalah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang kemudian dapat menghibahkan 1/3 dari hartanya.

Adapun dalam perkara pemberian hibah, Islam telah menggariskan bahwa orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika satu diberi maka yang lainnya juga harus di beri. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya

“Bersikaplah adil antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.” (HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubro no.12.003)¹⁷

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika orang tua yang akan memberikan hibah kepada anak-anaknya di anjurkan untuk berlaku adil baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila orang tua memberikan hibah kepada satu anak maka orang tua juga di haruskan untuk memberi hibah kepada anak-anaknya yang lain. Dalam hadits ini juga Nabi Muhammad Saw. mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah juga akan membuat anak-anak akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, jika ada ketidakadilan diantara mereka maka akan memicu kebencian terhadap anak-anaknya atau bahkan akan memicu kebencian terhadap orang tuannya.

Menurut sebagian ulama, keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membagikannya sesuai dengan hukum waris, dimana anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa harta yang di hibahkan dibagi rata tanpa memandang jenis kelamin. Seperti halnya dalil yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dalam hadits Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:

*“Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian hibah. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan”.*¹⁸

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a diatas juga menjelaskan terkait diharuskannya orang tua memberikan hibah itu disamaratakan, tidak membedakan jenis kelaminnya. Disamping itu pula Rasulullah Saw juga menyampaikan seandainya Beliau ingin melebihkan dalam pemberian hibah kepada seseorang, maka yang akan di lebihkan adalah anak perempuan. Hal ini jelas bahwa dalam pemberian hibah harus adil dan disamaratakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena pada dasarnya ketika menilik pada pembagian waris maka bagian laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan.

Dari beberapa perbedaan pendapat diatas terdapat *kemaslahatan* yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika terjadi konflik pada keluarga atas pembagian harta orang tua maka bisa memilih dari masing-masing pendapat tersebut sesuai

¹⁷ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 2003), Jilid 6. 295

¹⁸ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 2003), Jilid 6. 294.

kesepakatan bersama.

Kemudian jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya juga dapat di perhitungkan sebagai harta warisan. Pemberian orang tua semasa hidupnya dapat di perhitungkan sebagai waris tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Dalam penyelesaiannya jika terjadi sengketa atas harta warisan yang di berikan orang tua pada saat masih hidup dan di perebutkan kembali, bisa mengaju kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 211.

Didalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini, disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat dihitug sebagai warisan. Hal ini tentu juga dapat menimbulkan masalah dikeluarga jika tidak benar-benar memahami maksud dari pasal ini. Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hibah tidak memberikan patokan yang jelas kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai waris. Hanya saja dalam pasal 211 ini mengandung makna *kemaslahatan* bersama, yang mana dalam pasal ini di gunakan apabila dalam keadaan *dharurat*. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan, melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja.

Dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris. Sepanjang para ahli waris tidak mempersoalkan tentang hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dibagikan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi apabila sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan, maka dalam hal ini, tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan porsinya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hibah yang diperhitungan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan dan akan menghindarkan kepada perpecahan antar keluarga.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa factor terjadinya konflik akibat pembagian harta waris adalah (a) Pembagian yang tidak merata, (b) Tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, (c) Orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, (d) Adanya kesalah pahaman dalam keluarga, (e) anak yang di ikuti orang tua

biasanya mendapat bagian lebih banyak.

Dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris. Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari beberapa ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Pada pendapat ini dikuatkan pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian ketika terjadi konflik saat pembagian harta waris dengan hibah maka bisa menggunakan dari masing-masing pendapat diatas atau dapat mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211 tersebut. Disamping itu pula ketika terjadi konflik dikeluarga, sebaiknya pihak yang berknlik mau bermusyawarah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat atau dengan perangkat desa. Hal ini jika ini jika dilaksanakan maka dapat mengatasi kesenjangan dalam keluarga, yang nantinya ketika sudah selesai musyawarah dan mendapatkan masing-masing bagiannya bisa legowo dan bisa bertegur sapa kembali demi keutuhan keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-baihaqy, Imam. *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*. Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah. Juz 6. 2003.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010.
- Fitria, Rita. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah akibat tidak di Laksakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)”, Undergrate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Riadi, Dedi Agus dan Bartoven Vivit Nurdin. “Marga Pugung Tampak: Studi Konflik keluarga dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No. 2, (2016).

- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Supriyani, Wiwin. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)”, Undergrate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Tualeka, M. Wahid Nur. “*Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern.*” JURNAL AL-HIKMAH Vol.3 No.1 (2017).
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.